

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Mengacu pada Deklarasi Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dari kedua negara selama Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Polandia ke Republik Indonesia, tanggal 24 Februari 2004;

Mengingat pentingnya peningkatan kerjasama pertahanan dalam kerangka kerja dari kerja sama bilateral dan arti pentingnya bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;

Mengakui keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama teknik antara kedua negara yang telah ada berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan;

Menegaskan kembali komitmen internasional Para Pihak terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum;

Berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL I
TUJUAN**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja guna kerjasama pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan.

PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama dari Persetujuan ini adalah:
 - a. Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, antara lain perencanaan, organisasi, struktur unit militer dan dukungan logistik, administrasi dan manajemen personal, doktrin dan hukum serta regulasi mengenai angkatan bersenjata, termasuk implementasi ketentuan traktat internasional, di mana Para Pihak adalah Pihak, di bidang pertahanan, keamanan dan pengawasan senjata;
 - b. Kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - c. Pertukaran para Perwira untuk pendidikan pada Sekolah Staf dan pelatihan profesional;
 - d. Pendidikan militer dan pelatihan bagi personil militer, termasuk pengaplikasian teknik dan metode modern di bidang pengetahuan dan pendidikan militer;
 - e. Kerjasama teknik militer antara badan atau institusi khusus melalui pertukaran data ilmiah dan teknologi yang terkait, para ahli, teknisi dan pelatih;
 - f. Kerjasama dibidang teknologi pertahanan termasuk disain bersama, pembangunan, produksi dan pemasaran serta alih teknologi;
 - g. Persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata dan peralatan;
 - h. Aplikasi sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.
2. Permasalahan tertentu yang berhubungan dengan kerjasama di bidang-bidang yang disebutkan di atas dan di bidang lain yang disetujui bersama dapat dilaksanakan melalui pengaturan terpisah yang disepakati antara Badan-badan pelaksana atau melalui kontrak-kontrak yang disepakati oleh para pengusaha atau unit organisasi dari negara Para Pihak yang berkaitan dengan industri pertahanan.

PASAL III KOMITE BERSAMA

1. Untuk mencapai tujuan secara efektif dari Persetujuan ini, Para Pihak membentuk Komite Bersama Kerjasama Pertahanan, selanjutnya disebut "Komite Bersama".
2. Komposisi dari Komite ini akan ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak dan dapat melibatkan para ahli dalam jumlah terbatas dari kementerian, departemen atau badan lain yang ditentukan oleh masing-masing Pihak. Jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak akan diputuskan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.
3. Komite Bersama akan diketuai bersama oleh pejabat berwenang dari Para Pihak.
4. Komite Bersama, pada prinsipnya, akan bertemu sekali dalam setahun, atau lebih bila dibutuhkan, bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Polandia. Waktu, tempat, agenda dan pengaturan lain dari pertemuan akan dikomunikasikan oleh Ketua Bersama, melalui saluran diplomatik.
5. Komite Bersama dapat membentuk Sub-sub komite bila dibutuhkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Sub-sub komite ini wajib melapor kepada Komite Bersama.
6. Fungsi dan tugas Komite Bersama, antara lain, sebagai berikut :
 - a. Mengkaji dan mengidentifikasi ruang lingkup kerjasama yang menjadi kepentingan bersama.
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara badan industri dari kedua negara di bidang pertahanan.
 - c. Merancang program kerjasama, termasuk perencanaan dan implementasinya.
 - d. Mengkoordinasi, memantau dan mengawasi implementasi program kegiatan-kegiatan.
 - e. Mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari implementasi program yang telah ditetapkan dalam implementasi Persetujuan ini.

f. Membuat laporan bersama dari setiap pertemuan dan menyerahkan laporan tersebut kepada pejabat masing-masing Pihak.

7. Ketua Bersama atau perwakilan dari Komite Bersama dapat, bila diperlukan, berpartisipasi pada badan lain yang mungkin dibentuk dalam kerangka kerjasama bilateral antara kedua negara.

PASAL IV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai dengan hukum masing-masing negara, Para Pihak harus memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah, yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan ini. Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga akan diatur dalam persetujuan yang disepakati oleh Badan-badan dari Para Pihak di bidang kerjasama khusus.

PASAL V PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak dalam pengaturan pelaksanaan terpisah, setiap Pihak, sesuai dengan alokasi anggarannya, akan menanggung biayanya masing-masing dari kerjasama di bidang pertahanan.

PASAL VI PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA

Perlindungan bersama atas informasi rahasia yang dipertukarkan antara Para Pihak diatur dalam persetujuan terpisah.

**PASAL VII
PELAKSANAAN PERSETUJUAN**

Badan-badan pelaksana Persetujuan ini adalah:

1. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia : Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
2. Mewakili Pemerintah Republik Polandia : Menteri Pertahanan Nasional dan Menteri Ekonomi.

**PASAL VIII
AMANDEMEN**

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal X ayat 1 dari Persetujuan ini.

**PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 1, kedua Ketua Komite Bersama akan membawa perselisihan kepada Menteri Pertahanan masing-masing negara untuk penyelesaiannya.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL X
PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperbarui, melalui kesepakatan bersama Para Pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap pengaturan dan/atau kontrak yang disebut dalam Pasal II ayat 2, yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut, kecuali diputuskan lain melalui kesepakatan bersama.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2006, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Polandia dan Inggris. Semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK POLANDIA**

Signed

Signed

**JUWONO SUDARSONO
Menteri Pertahanan**

**RADOSLAW SIKORSKI
Menteri Pertahanan Nasional**

UMOWA
MIĘDZY
RZĄDEM REPUBLIKI INDONEZJI
A
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O WSPÓŁPRACY
W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

**UMOWA
MIĘDZY
RZĄDEM REPUBLIKI INDONEZJI
A
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O WSPÓŁPRACY
W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI**

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej „Stronami”,
nawiązując do Listu Intencyjnego, podpisanego przez ministrów obrony obu Państw
podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji dnia 24
lutego 2004 roku;

doceniając wagę promowania współpracy w dziedzinie obronności jako elementu
współpracy dwustronnej i jej szczególne znaczenie dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

odnotowując potrzebę wzmacniania istniejących więzi przyjaźni
i współpracy technicznej między oboma Państwami opartej na zasadach równości,
wzajemnych korzyści i pełnego poszanowania suwerenności;

potwierdzając swoje zobowiązania międzynarodowe do przestrzegania powszechnie
uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego;

postępując zgodnie z prawem wewnętrznym swoich Państw;

uzgodniły, co następuje:

**Artykuł I
Cel Umowy**

Celem niniejszej Umowy jest stworzenie podstaw dla dwustronnej współpracy
w dziedzinie obronności opartej na zasadach równości, wzajemnych korzyści
i pełnego poszanowania suwerenności.

Artykuł II Obszary współpracy

1. Współpraca, o której mowa w artykule I niniejszej Umowy, obejmuje następujące obszary:

- a. wymiany informacji w dziedzinie obronności i spraw wojskowych, w tym planowania, organizacji, struktury jednostek wojskowych i wsparcia logistycznego, personelu administracyjnego i zarządzającego, doktryny i norm prawnych, łącznie z wykonywaniem postanowień przepisów zawartych w umowach międzynarodowych dotyczących obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, stronami których są Rzeczpospolita Polska i Republika Indonezji;
- b. działalności służb poszukiwawczo – ratowniczych;
- c. wymiany oficerów w celu przeprowadzenia szkoleń w wyższych uczelniach wojskowych i szkoleń specjalistycznych;
- d. edukacji wojskowej i szkolenia personelu wojskowego, włączając zastosowanie nowoczesnych środków technicznych w procesie kształcenia i szkolenia;
- e. współpracy wojskowo – technicznej między specjalistycznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń naukowych i technologicznych, ekspertów, techników i instruktorów;
- f. współpracy w obszarze technologii obronnych włączając wspólne projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż oraz transfer technologii;
- g. uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w zakresie dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wyposażenie sił zbrojnych obu Państw, badań i rozwoju, wsparcia technicznego, obsługi i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
- h. zastosowania systemów informatycznych oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych w siłach zbrojnych obu Państw.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące współpracy w wyżej wymienionych dziedzinach oraz innych wspólnie uzgodnionych obszarach, będą określone w odrębnych porozumieniach zawieranych między organami wykonawczymi bądź w umowach zawieranych przez przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne Państw Stron prowadzących działalność w zakresie przemysłów obronnych.

Artykuł III Wspólny Komitet

1. Dla sprawnej realizacji celu niniejszej umowy Strony tworzą Wspólny Komitet Współpracy w dziedzinie Obronności dalej zwany „Wspólnym Komitetem”.
2. Skład Komitetu zostanie określony przez Strony i może zawierać ekspertów, w ograniczonej liczbie, z innych ministerstw, departamentów oraz agencji, co zostanie ustalone przez każdą ze Stron. Liczba przedstawicieli każdej Strony zostanie określona za ich obopólną zgodą.
3. Wspólnemu Komitetowi będą współprzewodniczyć odpowiedni przedstawiciele Stron.
4. Spotkania Wspólnego Komitetu będą miały miejsce, z zasady, raz w roku lub w razie potrzeby częściej, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indonezji. Data, miejsce, program oraz inne szczegóły spotkania zostaną przekazane przez Współprzewodniczących drogą dyplomatyczną.
5. W celu implementacji niniejszej umowy Wspólny Komitet, gdy uzna to za konieczne, może utworzyć podkomitety, które będą przed nim odpowiadały.
6. Funkcje i zadania Wspólnego Komitetu są, w szczególności, następujące:
 - a. badanie i identyfikowanie obszarów współpracy będących we wspólnym zainteresowaniu;
 - b. ułatwianie współpracy w dziedzinie obronności pomiędzy jednostkami przemysłowymi obydwu Państw;
 - c. tworzenie programu współpracy, włączając planowanie i jego wdrożenie;
 - d. koordynowanie, monitorowanie i kontrola wdrażanych programów współpracy;
 - e. ocenianie i rozwiązywanie problemów wynikłych z wdrażania wskazanego programu w trakcie wdrożenia niniejszej umowy
 - f. wypracowywanie wspólnych sprawozdań z każdego spotkania i ich przedkładanie odpowiednim władzom.

7. Współprzewodniczący lub przedstawiciele Wspólnego Komitetu mogą, jeśli zajdzie taka potrzeba, brać udział w spotkaniach innych zespołów, które zostaną utworzone w ramach współpracy w dziedzinie obronności pomiędzy obydwoma Państwami.

Artykuł IV Prawa własności intelektualnej

Zgodnie z ustawodawstwem swoich Państw Strony zapewnią skuteczną ochronę i rozpowszechnienie praw własności intelektualnej, w tym ich własności i użytkowania, które będą przekazywane bądź tworzone zgodnie z mniejszą Umową. Zagadnienia ochrony i rozpowszechniania praw własności intelektualnej, w tym ochronę uzasadnionych praw stron trzecich, będą uregulowane w porozumieniach zawartych przez organy Stron właściwe dla poszczególnych obszarów współpracy.

Artykuł V Finansowanie współpracy

O ile Strony w szczególnych przypadkach nie postanowią inaczej w odrębnych porozumieniach wykonawczych, każda ze Stron będzie ponosiła własne koszty związane ze współpracą w dziedzinie obronności w ramach przeznaczonych na ten cel własnych środków budżetowych.

Artykuł VI Ochrona informacji niejawnych

Wzajemna ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami uregulowana jest w odrębnej umowie.

Artykuł VII Wykonywanie postanowień niniejszej Umowy

Organami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszej Umowy są:

1. W imieniu Rządu Republiki Indonezji – Departament Obrony Republiki Indonezji.
2. W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Obrony Narodowej oraz Minister Gospodarki;

Artykuł VIII Zmiany

Niniejsza Umowa może być zmieniona na piśmie w każdym czasie za obopólną zgodą Stron. Zmiana taka wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu X ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł IX Rozstrzygnięcie sporów

1. Jakiegokolwiek spory powstałe w wyniku interpretacji lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą, w pierwszej instancji, przedkładane Wspólnemu Komitetowi w celu polubownego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na podstawie ustępu 1, obydwaj Współprzewodniczący przedstawiają sprawę swoim Ministrom Obrony w celu rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na podstawie ustępu 2, powinien on być rozstrzygnięty przez Strony drogą dyplomatyczną.

Artykuł X
Wejście w życie, obowiązywanie i wygaśnięcie

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty, w której Strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Umowa niniejsza jest zawarta na okres pięciu lat, po upływie którego może zostać przedłużona, za obopólną zgodą Stron, na kolejny okres pięcioletni. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnej notyfikacji co najmniej sześć miesięcy przed jej wygaśnięciem.
3. Wygaśnięcie niniejszej Umowy nie wpłynie na obowiązywanie lub okres trwania porozumień lub umów, o których mowa w Artykule II ustęp 2, zawartych na jej podstawie do momentu wypełnienia zobowiązań z nich wynikających, chyba że strony postanowią inaczej.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, indonezyjskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

**Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU
REPUBLIKI INDONEZJI**

**Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Signed

Signed

JUWONO SUDARSONO
Minister Obrony

RADOSŁAW SIKORSKI
Minister Obrony Narodowej

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING CO-OPERATION
IN
THE FIELD OF DEFENCE

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING CO-OPERATION
IN
THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Parties",

Recalling the Joint Declaration signed by the Ministers of Defence of both States during the State Visit to the Republic of Indonesia by the President of the Republic of Poland, on 24th February 2004;

Considering the importance of promoting defence co-operation in the framework of bilateral co-operation and of its particular significance for the maintenance of international peace and security;

Recognizing the need to strengthen the existing friendly relations and technical co-operation between the two States based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty;

Reaffirming their international commitments to the generally recognized principles and norms of the international law;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective States;

Have agreed as follows:

**ARTICLE I
OBJECTIVE**

The objective of this Agreement is to provide a framework for the defence co-operation of the two States based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty.

ARTICLE II AREAS OF CO-OPERATION

1. The scope of co-operation of this Agreement shall include:
 - a. Exchange of information on defence and military affairs, inter alia planning, organization, military unit structure and logistic support, personnel administration and management, doctrine and laws as well as regulations of the armed forces, including implementation of provisions of the international treaties to which they are parties in fields of defence, security and arms control;
 - b. Activities of search and rescue service;
 - c. Exchange of officers for education in staff-colleges and professional training;
 - d. Military education and training of the military personnel, including the application of modern technique and methods in military science and education;
 - e. Military-technical co-operation between specialized establishments or institutions through exchange of relevant scientific and technological data, experts, technicians and trainers;
 - f. Co-operation in the field of defence technologies including joint design, development, production and marketing and transfer of technology;
 - g. Armament and military equipment, including provision of modern armament and military equipment to the armed forces of both States, research and development, technical support, maintenance and overhaul of armament and equipment;
 - h. Application of information systems, information and communication technologies to the Armed Forces of both States.
2. Specific issues related to co-operation in the areas mentioned above and in other mutually agreed areas may be settled through separate arrangements concluded between the implementing organs or in contracts concluded by entrepreneurs or by organizational units of the States of the Parties dealing with defence industry.

**ARTICLE III
JOINT COMMITTEE**

1. In order to effectively pursue the objective of this Agreement, the Parties establish herein a Joint Defence Co-operation Committee, hereinafter referred to as the "Joint Committee".
2. The composition of this Committee shall be determined and decided upon by the Parties and may include experts in limited numbers from other ministries, departments or agencies as determined by each Party. The number of representative from each Party shall be decided by mutual consent between the Parties.
3. The Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate officials from the Parties.
4. The Joint Committee shall meet, in principle, once a year, or more when required, alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of Poland. The date, place, agenda and other details of the meeting shall be communicated by the Co-chairmen, through diplomatic channels.
5. The Joint Committee may set up sub-committees when it deems necessary for implementation of this Agreement. These sub-committees shall report to the Joint Committee.
6. The functions and tasks of the Joint Committee, inter alia, are as follow:
 - a. To explore and identify the areas of co-operation of common interest.
 - b. To facilitate co-operation between industrial entities of the both States in the field of defence.
 - c. To draw co-operation program, including its planning and implementation.
 - d. To co-ordinate, monitor and control the implemented program of activities.
 - e. To evaluate and resolve problems arising out from the implementation of the designated program in the implementation of this Agreement.

f. To work out a joint report of each meeting and to submit the report to their respective authorities.

7. The Co-Chairmen or representatives of the Joint Committee may, if appropriate, participate in other bodies which may be established within the framework of bilateral co-operation between both States.

ARTICLE IV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In accordance with the legislation of their States the Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this Agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate rights shall be regulated by the agreements concluded by organs of the Parties on specific areas of co-operation.

ARTICLE V FINANCING OF CO-OPERATION

Unless it is decided otherwise by the Parties in separate implementing arrangements, each Party shall, in accordance with its budgetary allocations, cover its own respective costs of the co-operation in the field of defence.

ARTICLE VI PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The mutual protection of classified information exchanged between the Parties is regulated in a separate agreement.

**ARTICLE VII
THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT**

Organs for the implementation of the Agreement are :

1. On behalf of the Government of the Republic of Indonesia : Department of Defence of the Republic of Indonesia.
2. On behalf of the Government of the Republic of Poland : the Minister of Defence and the Minister of Economy.

**ARTICLE VIII
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised at any time in writing by mutual consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force in accordance with the provision of Article X paragraph 1 of this Agreement.

**ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any disputes arising from this Agreement with respect to its interpretation or implementation shall in the first instance be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.
2. In the event that the dispute is not settled under paragraph 1, both Co-Chairmen of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence of their States for settlement.
3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

**ARTICLE X
ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties notify each other that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years, after which it will be renewed, by mutual consent of the Parties, for a consecutive 5 (five) year period. Either party may terminate this Agreement by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration.
3. Termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any arrangement and/or contract mentioned in Article II paragraph 2, made under the present Agreement until the completion of such arrangement and/or contract, unless otherwise decided by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this present Agreement.

DONE in Jakarta on June 6th, 2006 in two original copies in Indonesian, Polish and English languages. All texts being equally authentic. In case of any discrepancy in their interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF POLAND**

Signed

Signed

**JUWONO SUDARSONO
Minister of Defence**

**RADOSLAW SIKORSKI
Minister of National Defence**